

## BK DPRD SUMBAR

## Koordinasi Kunci Tegaknya Kode Etik

**PADANG, HALUAN** - Koordinasi dengan seluruh unsur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan suatu hal yang strategis untuk menegakkan kode etik dengan optimal.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbar Muzli M. Nur saat menerima kunjungan BK DPRD Kabupaten Solok Selatan (Solse), Jumat (2/1) di ruang kerjanya.

"Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga perilaku dan kedisiplinan para anggotanya. Untuk tegak kode etik agar marwah DPRD tetap terjaga, BK selalu berkoordinasi dengan fraksi-fraksi," katanya.

Dia menjelaskan, agar lebih efektif dan efisien, BK akan menggandeng fraksi-fraksi dalam menertibkan anggotanya. Hal ini tentu akan lebih mengena karena pada prinsipnya pembinaan itu berada pada fraksi.

"Ketika ada potensi atau hal yang tak sesuai dengan tatib tentu ini menjadi perhatian BK. Jika terkait anggota dewan, kita di BK akan langsung mengkomunikasikan dengan fraksi masing-masing," ujar dia.

Menurut dia pada prinsipnya



Muzli M. Nur

BK menjaga marwah anggota dewan dan lembaga. Apalagi dewan ini merupakan wakil rakyat yang mesti menjaga kehormatan. BK adalah salah satu AKD resmi di DPRD. Makanya harus serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dia menyampaikan bahwa



Berfoto bersama

kode etik DPRD telah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kode etik merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas kedewanan agar tidak keluar dari ketentuan yang ada untuk menjaga kehormatan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat," katanya

Sementara tata cara beracara juga telah memiliki ketentuan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Anggota BK DPRD Solse Edi Santoso mengatakan menyampaikan terima kasih atas sambutan tersebut. Dia menearangkan, pihaknya saat ini tengah membahas tentang kode etik dan tata cara beracara

sebagai tindak lanjut dari perubahan ketentuan perundang-undangan.

"Kami sangat berterima kasih atas sambutan DPRD Provinsi Sumatera Barat serta telah memberikan informasi dan data yang kami butuhkan dalam membahas hal ini, sangat membantu dalam penyempurnaan pembahasan," ujarnya.

Dia menambahkan, informasi dan dokumen terkait kode etik serta tata cara beracara tersebut akan dijadikan sebagai pembandingan dalam pembahasan, sehingga kode etik dan tata cara beracara yang sedang disusun menjadi lebih lengkap dan berkualitas. (adv)



Kunjungan BK DPRD Kabupaten Solok Selatan ke DPRD Sumbar



Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbar Muzli M. Nur saat menerima kunjungan BK DPRD Kabupaten Solok Selatan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) 443391 - 7059325 Padang 25133  
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

Padang, 01 Februari 2024

Nomor : 165/188/Persid-2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Hasil Uji Keadaptan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Prov. Sumbar Periode 2023-2027

Kepada Yth  
Sdr. Gubernur Sumatera Barat  
di  
Padang

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat Gubernur nomor : 555/1544/Diskominfotik/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal Pengiriman Nama Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat masa jabatan 2023-2027 dengan mempedomani : 1). Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Pasal 20 Ayat (5), dan 2). Surat Komisi Informasi Republik Indonesia No. 4/KIP/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Tanggapan atas Seleksi Anggota KI Sumatera Barat Periode 2023-2027, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

A. Hasil Uji Keadaptan dan Kelayakan DPRD Provinsi Sumatera Barat, memutuskan 5 (lima) orang Calon Anggota KI periode 2023-2027 sebagai berikut :

1. Mona Sisca
2. Musfi Yendra
3. Riswandi
4. Tanti Endang Lestari
5. Idham Fadhi

Selanjutnya DPRD Provinsi Sumatera Barat memutuskan Calon Cadangan Anggota KI sebagai berikut :

1. Muhammad Sjahbana Sjam
2. Jafni Eka Saputra
3. Vira Kumla Yandri
4. Budi Warman

B. Memenuhi maksud ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, DPRD Provinsi menyampaikan Hasil Uji Keadaptan dan Kelayakan kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Demikian disampaikan, untuk maklum dan terima kasih.



Dewan Komisaris, Direksi & Karyawan/ti  
**BANK NAGARI**  
Mengucapkan  
**SELAMAT HARI JADI**



**TERUS BERTUMBUH  
MENUJU  
SIJUNJUNG MAJU**

18 FEBRUARI 1949 - 18 FEBRUARI 2024



ttd

Ir. Benni Warlis, MM  
Komisaris Utama

ttd

Ir. Muhamad Irsyad, MM  
Direktur Utama